

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya risiko terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi iklim di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dan cenderung tidak stabil dari waktu ke waktu. Perubahan iklim ditandai dengan adanya perubahan pola cuaca dalam jangka panjang, seperti peningkatan suhu udara, perubahan pola musim, serta perubahan distribusi curah hujan. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor pertanian, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan. Selain itu, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap aktivitas manusia dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meluncurkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai upaya untuk menghadapi rintangan terjadinya perubahan iklim. ProKlim merupakan program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ketahanan dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim melalui kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah. Program ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024)

Program lingkungan iklim dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi di tingkat komunitas. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan Masyarakat (Yuwono et al., 2024). ProKlim menerapkan pendekatan partisipatif dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan

meningkatkan kualitas hidup melalui tindakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim pasal 1 ayat 5, diatur bahwa pelaksana program Kampung Iklim adalah komunitas yang tinggal di lokasi Kampung Iklim (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017). Pelaksana Program Kampung Iklim melibatkan Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, LSM, serta mitra pembangunan berdasarkan pasal 1 ayat 8 dan 9. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2, Program Kampung Iklim, yang selanjutnya dikenal sebagai ProKlim, adalah program berskala nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan meminimalisir emisi gas rumah kaca, serta memberikan penghargaan atas upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan di tingkat lokal sesuai dengan keadaan setempat. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Komponen utama ProKlim adalah Adaptasi dan Mitigasi. Adaptasi perubahan iklim bertujuan meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, seperti kejadian iklim ekstrem dan keragaman iklim, sehingga potensi kerusakan dapat diminimalkan. Sementara itu, mitigasi perubahan iklim merupakan upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bentuk pencegahan dampak perubahan iklim. Dengan demikian, adaptasi dan mitigasi bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012).

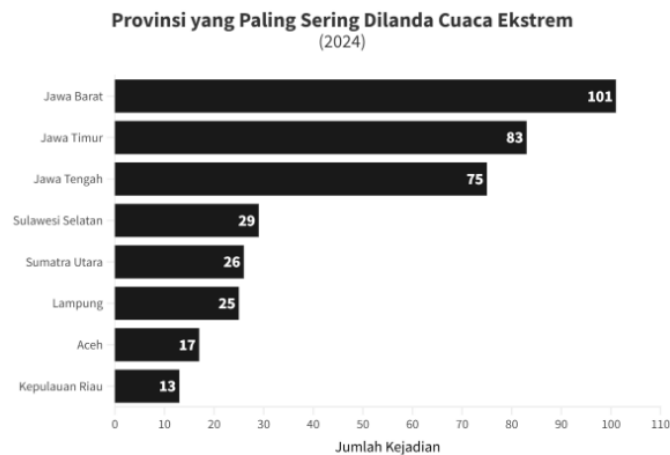
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 19 Tahun 2012, adaptasi perubahan iklim didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, keragaman iklim, dan kejadian iklim ekstrem. Tujuan adaptasi adalah mengurangi potensi kerusakan,

memanfaatkan peluang, dan mengatasi konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim. Dengan demikian, adaptasi perubahan iklim menjadi penting dalam meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 19 Tahun 2012, mitigasi perubahan iklim mencakup serangkaian tindakan untuk menekan emisi gas rumah kaca guna mengatasi efek perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim sangat krusial untuk mengecilkan sumbangan gas rumah kaca dan memperlambat kecepatan perubahan iklim karena hal tersebut mampu menciptakan lingkungan yang sehat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Lingkungan yang sehat seperti tidak membuang sampah sembarangan diperlukan kesadaran Masyarakat dengan pemerintah. Program Kampung Iklim merupakan inovasi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat pada daerah yang memiliki iklim ekstrem, Program Kampung Iklim memerlukan inovasi yang berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Melalui inovasi tersebut, masyarakat dapat terdorong untuk menerapkan perilaku hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan sehingga dapat mendukung upaya pengurangan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A'raf: 56). Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam.

Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan Program Kampung Iklim yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat merupakan provinsi terpadat di Indonesia, berdasarkan data *Statistical Yearbook of Indonesia 2024* oleh BPS jumlah penduduk Jawa Barat berjumlah 50.489.208 Jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Jawa Barat, sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi, sangat membutuhkan implementasi Program Kampung Iklim, terutama di wilayah perkotaan. Dengan 20 kabupaten dan 9 kota, Jawa Barat rentan terhadap perubahan

iklim. Jawa Barat sering dilanda cuaca ekstrem, sehingga penerapan Program Kampung Iklim sangat penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan mengurangi risiko bencana.



Gambar 1.1 Provinsi Yang Paling Sering Mengalami Cuaca Ekstrem

Sumber: BNPB, 2024

Menurut data BNPB tahun 2024, Jawa Barat menjadi wilayah dengan kejadian cuaca ekstrem tertinggi, yaitu 101 kejadian. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan populasi yang padat, serta peningkatan intensitas hujan lebat akibat perubahan iklim. Wilayah Jawa Barat yang luas dan rawan banjir membuatnya rentan terhadap bencana. Banjir seringkali terjadi di wilayah ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan dan limbah industri yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Pemerintah Jawa Barat telah mengimplementasikan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan. Program ini ditandai dengan capaian kinerja yang baik dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah domestik (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2021). Pada tahun 2024, Jawa Barat berhasil mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 100,55%, dengan realisasi

penurunan emisi sebesar 13,68% dari target 12,83%. Hal ini setara dengan penurunan emisi sebesar 507.670,86 Ton CO₂ Eq terhadap *Business as Usual* 2030. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Jawa Barat dalam mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi GRK (LKIP DLH, 2024).

Tingkat Upaya Penurunan Emisi GRK Limbah Domestik Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan signifikan dalam realisasi, yaitu sebesar 2,64% dari tahun 2023 (10,26%) ke tahun 2024 (13,68%). Namun, dari aspek pencapaian kinerja, terjadi penurunan sebesar 61,57% dari tahun 2023 (168,20%) ke tahun 2024 (106,63%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi penurunan emisi meningkat, capaian kinerja secara keseluruhan menurun dibandingkan tahun sebelumnya (LKIP DLH, 2024). Capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Limbah Domestik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 13,63% dari target 12,83%. (LKIP DLH, 2024)

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Jawa Barat menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Ciamis dan Kota Cimahi, telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan ProKlim, bahkan meraih penghargaan tingkat nasional (ProKlim Lestari). Akan tetapi masih adanya beberapa daerah di Jawa Barat yang belum berhasil menerapkan ProKlim, terbukti masih adanya daerah-daerah di Jawa Barat yang dilanda banjir dan tanah longsor, fenomena tersebut dikarenakan kurang pedulinya Masyarakat dan pemerintah akan lingkungan sekitar, seperti membung sampah sembarangan, penampungan sampah yang kurang banyak serta banyaknya tempat legal diatas pegunungan yang berpotensi menciptakan longsor.

permasalahan lingkungan di Jawa Barat juga tercermin dari kondisi darurat sampah di Kota Bandung. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat pengelolaan sampah di Kota Bandung masih tergolong rendah, yaitu sekitar 22% dari total sampah yang dihasilkan. Penggunaan teknologi seperti insinerator dalam penanganan sampah juga menimbulkan polemik karena berpotensi mencemari udara dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun tata kelola. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan masih cenderung belum berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat seringkali hanya terjadi ketika terdapat program dari pemerintah, sehingga belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran kolektif yang mandiri. Di sisi lain, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya juga belum berjalan secara optimal.

Masyarakat merupakan pihak yang paling terdampak langsung oleh perubahan iklim, sehingga mereka perlu diberdayakan untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan iklim, dampaknya, dan cara menghadapinya. Oleh karena itu, Program Kampung Iklim hadir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta menjaga lingkungan. Melalui Program Kampung Iklim, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan lingkungan melalui kerja sama dan kolaborasi antar berbagai pihak. Selain itu, kolaborasi tersebut juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan anggaran.

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Jawa Barat memerlukan penerapan *interactive governance* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Konsep *interactive governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan publik secara kolaboratif. Melalui kerja sama dan interaksi antar aktor, pelaksanaan Program Kampung Iklim diharapkan mampu

berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Menurut (Torfing et al., 2012), *interactive governance* memiliki lima aspek penting, yaitu keterlibatan aktif masyarakat, kerja sama dan kolaborasi, transparansi dan akuntabilitas, penggunaan teknologi digital, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam *governance* juga terkait erat dengan aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat dilihat dari pergeseran parameter iklim seperti curah hujan, suhu, dan kelembaban, yang memiliki dampak luas pada ekosistem dan manusia di seluruh dunia. Dampaknya meliputi peningkatan risiko kesehatan, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dan mengatasi dampak negatif tersebut (Jupri et al., 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti menduga bahwa penerapan *Interactive Governance* pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui Program Kampung Iklim di Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini diduga karena belum optimalnya aspek keterlibatan aktif masyarakat dan kerja sama serta kolaborasi. Fakta tersebut terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, masih ditemukannya perilaku membuang sampah sembarangan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan yang belum berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim juga belum berjalan secara efektif di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Maka dari itu dengan adanya konsep *Interactive Governance* yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat akan mempermudah jalannya Proklamasi khususnya di Provinsi Jawa Barat yang terkenal memiliki iklim yang cepat untuk berubah atau ekstrem. Sebagaimana menurut (Sakti et al., 2023), yang menjelaskan bahwa Pembangunan suatu desa atau daerah dibutuhkan kolaborasi antara aktor-aktor ekologi administrasi publik. Aktor-aktor tersebut yaitu pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi/perguruan tinggi.

Permasalahan di atas diduga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Kampung Iklim dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan Interactive Governance pada Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Interaksi pemerintah dan masyarakat dalam konteks *governance* juga terkait erat dengan aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan iklim
2. Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi peringkat pertama yang sering dilanda cuaca ekstrem yang mengakibatkan lingkungan rusak.
3. Sering terjadinya banjir akibat kurang pedulinya masyarakat dalam membuang sampah dan tercemarnya udara akibat pabrik-pabrik yang tidak taat aturan.
4. Pemerintah Jawa Barat menerapkan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang merupakan salah satu dari program Kampung Iklim.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disusun permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan aktif Masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat?

4. Apakah teknologi digital digunakan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana pengambilan keputusan berbasis data dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterlibatan aktif Masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat,
2. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui apakah teknologi digital digunakan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan berbasis data dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat.

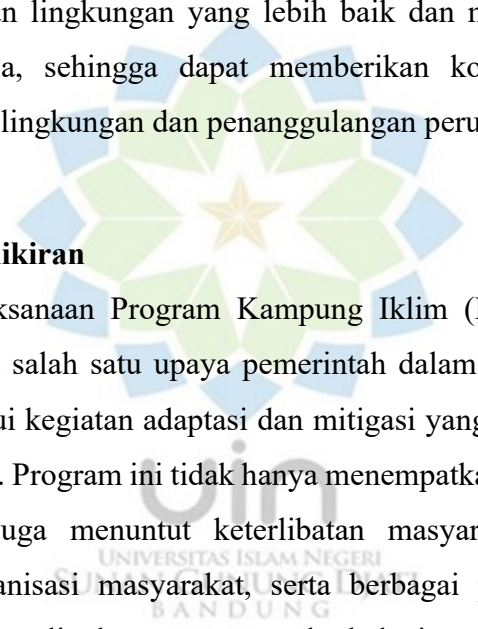
E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam pelaksanaan program, selanjutnya diharapkan menjadi pengajaran mengenai teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam penerapan kampung iklim.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 
- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti sendiri dan pihak lain dalam mengimplementasikan program Kampung Iklim melalui pendekatan *Interactive Governance*.
 - b. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi pihak terkait, terutama dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait dengan implementasi *Interactive Governance* pada Program Kampung Iklim.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga dapat memberikan kontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Program ini tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta berbagai pihak lainnya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan Program Kampung Iklim tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas interaksi, komunikasi, dan kolaborasi yang terjalin antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Meskipun Program Kampung Iklim telah dilaksanakan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat, masih ditemukan sejumlah permasalahan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, rendahnya tingkat pengelolaan sampah, serta belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan masih cenderung belum berkelanjutan dan sering kali hanya meningkat ketika terdapat program yang

diinisiasi oleh pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim memerlukan tata kelola yang mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong kolaborasi berbagai aktor dalam mencapai tujuan program.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan konsep Interactive Governance sebagai landasan teoritis penelitian. Konsep Interactive Governance dipandang relevan karena menekankan pentingnya interaksi antar aktor dalam penyelenggaraan kebijakan dan program publik. Melalui konsep ini, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, tetapi juga dari kemampuan membangun kerja sama, partisipasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pelaksanaannya.

Sebagai pisau analisis penelitian, peneliti menggunakan konsep Interactive Governance yang dikemukakan oleh Jacob Torfing et al. (2012). Menurut Torfing et al. (2012), terdapat lima aspek dalam Interactive Governance yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan suatu program publik, yaitu:

1. Keterlibatan Aktif Masyarakat (Active Citizen Participation), yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
2. Kerja Sama dan Kolaborasi (Collaboration and Partnership), yaitu adanya sinergi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan aktor lainnya dalam mencapai tujuan bersama.
3. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability), yaitu keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program kepada masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital (Digital Technology Utilization), yaitu penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, dan pendukung pelaksanaan program.
5. Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Data-Driven Decision Making), yaitu penggunaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan.

Dari kelima aspek tersebut, peneliti menduga bahwa aspek keterlibatan aktif masyarakat menjadi aspek yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Provinsi Jawa Barat. Dugaan tersebut didasarkan pada fenomena yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih belum optimal, yang terlihat dari masih ditemukannya perilaku membuang sampah sembarangan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan yang berkelanjutan, serta masih terjadinya berbagai permasalahan lingkungan di sejumlah daerah. Padahal, masyarakat merupakan salah satu aktor utama dalam Program Kampung Iklim sehingga keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2025

G. Proposisi

Keberhasilan Program Lingkungan Iklim di Jawa Barat menunjukkan bahwa dengan adanya *Interactive Governance*, pemerintah dan Masyarakat mampu menjalankan program lingkungan iklim sesuai dengan konsep *Interactive Governance* yaitu Keterlibatan Aktif Masyarakat, Kerja Sama dan Kolaborasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Penggunaan Teknologi Digital, dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data.

Namafile: REVISI SKRIPSI NIFA SIDANG AKHIR salinan.docx
Direktori: /Users/ipehh/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Do
cuments
Templat: /Users/ipehh/Library/Group
Containers/UBF8T346G9.Office/User
Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm
Judul:
Subjek:
Penulis: Verdien Gumilang
Kata kunci:
Komentar:
Tanggal Pembuatan: 19/07/26 16.48.00
Ubah Angka: 2
Disimpan Terakhir pada: 19/07/26 16.48.00
Terakhir Disimpan oleh: nifa ber
Waktu Pengeditan Total: 1 Menit
Terakhir Dicitak pada: 19/07/26 16.48.00
Sebagai Pencetakan yang Terakhir Selesai
Jumlah Halaman: 13
Jumlah Kata: 2.815
Jumlah Karakter: 19.701 (sekitar)